

PUBLIKASI ILMIAH

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH (Studi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir)

**Diajukan Oleh:
Erwin Saputra, SE.
NPM. A21211080**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kamarullah, SH., M.Hum

Pembimbing II : Haryadi, SH., M.Hum..

Abstract

This thesis discusses regional expansion sosiolegal analysis based on Government Regulation No. 78 of 2007 on the Procedures for the Establishment, Abolition, and the Regional Merger (the study of coastal Sambas district division). This research was conducted using the method of juridical research with sociological approach. This thesis research results obtained: Struggle Sambas District Coastal division since 2003 which is based on and interpreted in order to actualize the aspirations and demands of society to realize the local government as part of Sambas district in improving the people's interest and public service. Sambas district government has been working with the University of Indonesia in 2007 to conduct a study expansion Sambas Regency Coastal and Sambas, recommendation meet category capable but not mernenuhi condition number of districts because only three districts, sub-districts so that a division into five districts by the Government of Sambas district. Expansion candidate Coastal Sambas district of Sambas district in West Kalimantan Province based on academic studies in accordance with the technical requirements set out in the Regulation. No. 78 of 2007 had a total value of factor formation of new autonomous regions with a total value of 426 in the category of very capable. While deciding factor for the total value of the indicator value is 90 demographic factors, economic capacity factor value is 65, the area of potential factor value is 67 and the financial ability factor value 60. Kabupaten Mains Sambas Regency academic studies in accordance with the technical requirements set out in the Regulation. No. 78 of 2007 have amounted to a total of 471 with kategori nilai very capable. While deciding factor for the total value of the indicator value is 90 demographic factors, economic capacity factor value is 75, the value area 73 potensi factors and financial capacity factor value 75. Berdasarkan technical requirements set out in the Regulation. No. 78 In 2007, the Coastal Sambas district candidate, declared befitting become a new autonomous region. Furthermore, it can be proposed in accordance with the requirements of the establishment of an autonomous region for approval Regent and District Sambas and subsequently forwarded for approval by the Governor and Council of West Kalimantan and West Kalimantan Governor forward to the Minister of the Interior in order to get approval. The recommendations are efforts and expansion activities Sambas Regency Coastal and Sambas district can address the interests of the public and all parties work together and always follow the mechanisms and procedures set out in Regulation No. 78 of 2007 on Procedures for the Establishment, Abolition and Merger Daerah. Untuk meet the administrative requirements of the expansion

candidate Sambas Regency Coastal and Sambas district are equipped with the regional spatial plan Sambas district and Coastal Sambas district candidates who are approved by Parliament and the Regent and Sambas. Sambas district government subsequently submitted to the Government of West Kalimantan Province for approval in the form of Council Decisions and the Governor of West Kalimantan on the approval of the establishment candidate Sambas Regency Coastal and submit to the Minister of the Interior.

Keywords: Analysis of Sambas District Redistricting Sosiolegal Coastal

Abstrak

Tesis ini membahas analisis sosiolegal pemekaran daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (studi pemekaran kabupaten sambas pesisir). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian tesis ini diperoleh : Perjuangan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir sejak tahun 2003 yang dilandasi dan dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah sebagai bagian dari Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kepentingan rakyat dan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sambas telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2007 untuk melakukan pengkajian pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas, rekomendasinya memenuhi kategori mampu tetapi tidak mernenuhi syarat jumlah kecamatan karena hanya tiga kecamatan, sehingga dilakukan pemekaran kecamatan menjadi lima kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Pemekaran calon Kabupaten Sambas Pesisir dari Kabupaten Sambas pada Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kajian akademik sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam PP. No. 78 Tahun 2007 mempunyai total nilai faktor pembentukan daerah otonom baru dengan jumlah nilai 426 dengan kategori sangat mampu. Sedangkan faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan nilainya 90, faktor kemampuan ekonomi nilainya 65, faktor potensi daerah nilainya 67 dan faktor kemampuan keuangan nilainya 60. Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten Induk kajian akademik sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam PP. No. 78 Tahun 2007 mempunyai total nilai berjumlah 471 dengan kategori sangat mampu. Sedangkan faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan nilainya 90, faktor kemampuan ekonomi nilainya 75, faktor potensi daerah nilainya 73 dan faktor kemampuan keuangan nilainya 75. Berdasarkan persyaratan teknis yang diatur dalam PP. No. 78 Tahun 2007, maka calon Kabupaten Sambas Pesisir, dinyatakan layak menjadi daerah otonom baru. Selanjutnya dapat diusulkan sesuai dengan persyaratan pembentukan daerah otonom untuk mendapatkan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas dan selanjutnya diteruskan untuk mendapat persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta Gubernur Provinsi Kalimantan Barat meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan persetujuannya. Rekomendasinya adalah Upaya dan aktivitas pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas mensikapi kepentingan masyarakat dan semua pihak yang bersinergi serta senantiasa mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Untuk memenuhi persyaratan administratif tentang pemekaran calon Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas yang dilengkapi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sambas dan calon Kabupaten Sambas Pesisir yang mendapat

persetujuan dan DPRD dan Bupati Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas selanjutnya mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Sambas Pesisir dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Kata Kunci : Analisis Sosiolegal Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir

Latar Belakang

Otonomi daerah tak disangkal telah menimbulkan euforia kemandirian pada tingkat daerah. Kewenangan daerah untuk mengelola perekonomiannya sendiri menimbulkan banyak penafsiran, antara lain daerah bisa leluasa mengoptimalkan segala potensi ekonomi yang ada menjadi sumber pendapatan daerah, tentunya dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Dampak positif dari reformasi total ini, telah terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan otonomi daerah. Dampak positif inilah yang kemudian melahirkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya kedua undang-undang ini dipandang sangat penting, karena melalui pelaksanaan kedua undang-undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintahan daerah yang semata-mata mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di ganti dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, bangsa Indonesia sedang memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih desentralistik dan demokratis dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan wilayahnya dan peraturan perundang-undangan, serta memberikan peranan dan fungsi kepada DPRD lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka timbul pemikiran perlunya memberikan kewenangan otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Hal ini didasarkan kepada pemikiran, bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya tersimpul makna

pendewasaan politik rakyat daerah di mana terwujud peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melainkan juga sekaligus bermakna mensejahterakan rakyat. Sebab, bagaimanapun juga tuntutan pemerataan, tuntutan keadilan yang sering dilancarkan, baik menyangkut bidang ekonomi maupun politik pada akhirnya akan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan perubahan yang sangat mendasar ini, dampak yang akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, bukan hanya sekedar menyangkut kepada perubahan sistem dan struktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama kepada kesiapan dan ketersediaan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan akuntabel. Sumber daya manusia aparatur yang diperlukan bukan hanya yang memiliki keterampilan dan kemampuan profesional di bidangnya. melainkan juga memiliki etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, pemekaran wilayah sebagai salah satu perwujudan pentingnya pertimbangan kesejahteraan rakyat merupakan jawaban yang positif bagi perkembangan pembangunan bangsa dan negara dewasa ini. Tidak dapat dipungkiri, dengan luasan geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia, seringkali menjadi kendala pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Pentingnya perluasan jaringan pemerintahan melalui konsep pemekaran wilayah ini, sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang pemerintahan daerah adalah diperuntukkan seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir sebagai pemekaran Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, tentunya memiliki dasar tujuan yang sama dengan apa yang telah ditentukan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di ganti dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014.

Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten dan kota sebagai pemerintahan daerah tingkat kedua sesudah provinsi diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan terciptanya kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi

merupakan pemecahan secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru atau kabupaten/kota baru.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Kemudian dalam Pasal 4 dinyatakan:

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian Pasal 5 menyatakan:

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Selanjutnya Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur mengenai penghapusan dan penggabungan daerah, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat ini peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.

Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir yang sudah digagas sejak Tahun 2007 merupakan keinginan masyarakat yang berada di wilayah calon Kabupaten Sambas Pesisir. Syarat teknis dalam pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah sudah memadai bagi pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir. Demikian juga halnya dengan syarat fisik yang meliputi paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan sudah memadai. Untuk calon Kabupaten Sambas Pesisir meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu: Kecamatan Selakau, Selakau Timur, Pemangkat, Semparuk, dan Salatiga.

Mengenai syarat administratif yang meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten dan Bupati yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri, merupakan persyaratan yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup panjang dalam pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir, karena selain menyangkut persoalan hukum, persetujuan tersebut juga menyangkut persoalan politik, karena agak berat bagi pemerintah Kabupaten Sambas (kabupaten induk) untuk melepas kecamatan yang berada di wilayah calon Kabupaten Sambas Pesisir yang memiliki sumber-sumber pendapatan yang cukup besar.

Dalam pemekaran suatu daerah, maka peran pemerintah daerah yang akan dimekarkan (daerah induk) sangat besar, sehingga kunci pemekaran suatu daerah sangat tergantung dari daerah induk. Berbagai hambatan muncul dalam rencana pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir, sehingga sampai dengan saat ini rencana pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir masih belum terwujud, dan masih dalam proses pengkajian dan pembahasan di tingkat daerah.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **"Analisis Sosiolegal Pemekaran Daerah Berdasarkan Peraturan**

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah (Studi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir)’’.

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada Latar Belakang Penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Hambatan apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir?
2. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah?

Pembahasan

A. Hambatan Yang Mempengaruhi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir

1. Faktor Penyebab Pemekaran

- a. **Faktor Politis**, Kecendrungan yang dipertimbangkan untuk pemekaran daerah Kabupaten Sambas Pesisir adalah terkait dengan pertimbangan pemerataan dan terlalu luasnya daerah bintan, namun kepentingan yang sangat penting haruslah dikaji lebih mendalam dan di analisis secara kualitas, satu sisi diharapkan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir akan mampu menjalankan bagaimana roda pemerintahan kedepan, baik itu eksekutif maupun legislatif apakah eksekutif telah memadai, bagaimana situasi sarana dan prasaran pemerintahan yang akan dijadikan sebagai daerah otonom baru, indikasi lobi-lobi dikalangan elite sebagai suatu proses administrasi sebagai salah satu contoh yang dijadikan syarat yang sangat mendasar untuk melakukan pemekaran kepada dewan pertimbangan otonomi baru (DPOB), sehingga analisis kajian-kajian yang lain cenderung tidak dipertimbangkan secara kualitas, hanya mengandalkan angka-angka yang bersifat kuantitas atau tercapai atau tidak dicapai, dan hal ini lah yang menjadikan para elite untuk mencari popularitas.

b. Faktor efektivitas dan efisiensi, Esensi pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali serta menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan, konsentrasi pembangunan yang tidak merata sehingga masyarakat beranggapan pemerintah induk tidak mampu menjawab persoalan-persoalan rakyat secara konsisten, jauhnya jarak pelayanan publik kepada masyarakat dan kurangnya konsentrasi pembangunan yang tidak merata yang dilakukan oleh pemerintah induk harusnya dijadikan tantangan oleh pemerintah induk untuk dicarikan solusinya, dan diharapkan upaya-upaya bagi- bagi kekuasaan semestinya tidak menjadi alasan yang selama ini dijadikan kekuatan sebagai bentuk aspirasi rakyat.

c. Faktor Aspirasi Masyarakat, Aspirasi rakyat Kabupaten Sambas Pesisir bisa lebih terdengar, dimana keinginan pemekaran ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat bersatu dalam mengawal pemekaran daerah Bintan Timur, selain itu pemerintah juga mengapresiasi keinginan pemekaran daerah Bintan Timur, hal ini berkaitan dengan terpenuhi aspirasi rakyat sebagai dasar pendidikan politik dan bebas mengeluarkan pendapat bagi setiap masyarakat untuk memajukan daerahnya.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa prospek pemekaran daerah bintan Timur haruslah dilihat secara jelas, apakah penduduk cukup prospektif, bagaimana persyaratan administrasi dapat terpenuhi serta kemampuan daerah nantinya dalam hal finansial, kelemahankelemahan SDM yang belum kuat harusnya dapat dikaji, agar kerawanan politik dan konflik elite tidak menjadikan rakyat sebagai objek saja.

2. Hambatan dan Dukungan Proses Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir

a. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sambas Pesisir, Kabupaten Sambas Pesisir rencananya akan dijadikan sebagai daerah pemekaran, daerah ini akan dikembangkan berdasarkan potensi yang dimilikinya dan diperkirakan akan lebih maju dibandingkan daerah induknya. Diantaranya potensi-potensi yang akan digali dari Kabupaten Kabupaten Sambas Pesisir ini antara lain industri perikanan, perkebunan, pelabuhan baik nasional maupun internasional. Potensi-potensi yang dapat

dilihat dari calon Kabupaten Kabupaten Sambas Pesisir adalah potensi Perikanan, pertanian yang di dalamnya mencakup sektor pangan dan hortikultura, dan ini juga sejalan dengan program pusat untuk peningkatan sarana produksi pertanian, jika dilihat dari data terkait dengan potensi pertanian di daerah Bintan Timur, potensi pengembangan menurut kecamatan yang nantinya merupakan wilayah administrasi Kabupaten Sambas Pesisir.

b. Polemik Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir., Dinamika pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir., tidak terlepas dari beberapa kiprah elit lokal yang sangat mendukung pembentukan tersebut, jika dilihat dari sejarah pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir, PPKSP (Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir) adalah wadah yang memelopori terbentuknya calon Kabupaten Sambas Pesisir. Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan birokrasi biasanya memelopori urusan pemekaran daerah. Daerah induk kadang menentang, namun tak jarang kabupaten induk mengalah (mendukung pemekaran) asalkan dirinya tidak diganggu selama menjabat. Dalam beberapa kasus, ada juga karena kalangan intelektual kalah bersaing di kampus, maka mengusulkan pemekaran di daerah asalnya . Maka dalam hal ini sesuai dengan salah satu variabel yaitu Politik Kontestasi Elit Lokal. Dari gambaran diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perebutan kekuasaan masih cenderung menjadi motif dasar pemekaran, kepentingan politik bisa saja menjadi alasan dasar untuk memikirkan percepatan, melihat dari sumber daya yang dimiliki, beberapa dari SDM pelaku pemekaran adalah pejabat-pejabat yang dulu pernah menjabat di pemerintahan maupun legislatif. Dukungan pemerintah yang responsif, menjadi kekuatan besar bagi PPKSP untuk mengawal proses pemekaran.

c. Potensi Elite Lokal, Ajang bagi pejabat publik, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas. Alasannya *the power of elite* itu saling berlomba-lomba mendengarkan dan mewujudkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dipilih kembali. Dengan mewujudkan pembentukan daerah seolah-olah aspirasi masyarakat diwujudkan dan ini merupakan bagian dari pencitraan politik .

Dorongan untuk memisahkan Kabupaten Sambas Pesisir dari Kabupaten Sambas tidak hanya dijadikan sebagai komoditas politik semata dari segelintir orang-orang yang punya kepentingan. Jika memang keinginan itu serius dan murni dari warga sambas, akan lebih terbuka peluang jika ditempuh melalui jalurjalur resmi secara konstitusional tanpa perlu memanfaatkan momentum jelang pesta demokrasi. Dari pengamatan dan pandangan penulis dari beberapa elite yang mencari popularitas dalam hal pembentukan daerah otonom baru Sambas Pesisir, pro kontra dalam berdemokrasi sangat di wajarkan, namun dengan adanya proses pemekaran Sambas Pesisir, masih banyak dijadikan sebagai ajang untuk mencari popularitas semata, hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh pembentukan, hampir dari segian banyak adalah wajah-wajah lama yang tidak lagi menjadi legislatif.

3. Analisis Calon Ibu Kota Kabupaten Sambas Pesisir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 bahwa calon ibu kota daerah otonom kriterianya secara umum memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Lokasi berada ditengah - tengah dari jumlah wilayah kecamatan calon Kabupaten Sambas Pesisir ;
2. Mempunyai kesesuaian dan daya dukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas ;
3. Kawasan lokasi yang ditandai dengan memiliki sedikit resiko bencana alam, tidak berada dalam kawasan hutan lindung, kemiringan lereng kurang dari 21% dan ketersediaan lahan untuk prasarana bangunan pemerintahan dan umum ;
4. Pemanfaatan dan penggunaan kawasan budidaya yang didukung dengan ketersediaan lahan untuk prasarana bangunan dan umum serta drainase permukaan yang baik ;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang didukung dengan sejarah pusat pemerintahan ;
6. Adanya dukungan masyarakat dalam pengembangan kawasan lokasi calon Ibukota Kabupaten Sambas Pesisir.

Berdasarkan gambaran kriteria umum tersebut di atas, disesuaikan dengan memperhatikan hasil survey dan wawancara dengan berbagai elemen dan tokoh masyarakat, maka calon Ibukota Kabupaten Sambas Pesisir dapat dipertimbangkan lokasinya berada di **Kecamatan Salatiga** sebagai pemekaran

dan **Kecamatan Pemangkat** tahun 2007 dan wilayahnya dilihat dari sejarah pemerintahan adalah bekas wilayah **Kewedanaan Pemangkat**.

Berdasar kajian analisis pembentukan kabupaten berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 tersebut di atas, maka hasil perhitungan bobot nilai Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel.3
Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten Sambas (Induk)

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Nilai	Bobot Nilai
1	2	3	4	5
1	Kependudukan	20		
	1. Jumlah Penduduk		15	75
	2. Kepadatan Penduduk		3	15
				90
2	Kemampuan Ekonomi	15		
	3. PDRB Non Migas		5	25
	4. Pertumbuhan Ekonomi		5	25
	5. Kontribusi Non Migas		5	25
				75
3	Potensi Daerah	15		
	6. Rasio Bank dan Lembaga Non Bank per 10.000 penduduk		2,0	10
	7. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk		1,0	5
	8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk		1,0	5
	9. Rasio Sekolah SD per penduduk usia SD		1,0	5
	10. Rasio Sekolah SLTP per penduduk usia SLTP		1,0	5
	11. Rasio Sekolah SLTA per penduduk Usia SLTA		1,0	5
	12. Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 penduduk		1,0	5
	13. Rasio Tenaga Medis per 10.000 penduduk		1,0	5
	14. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor dan Perahu motor atau Kapal		1,0	5
	15. Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga		0,6	3
	16. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor		1,0	5
	17. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk usia 18 Tahun Keatas		1,0	5
	18. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk usia 25 Tahun Keatas		1,0	5
1	2	3	4	5
	19. Pasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk		1,0	5
				73
4	Kemampuan Keuangan	15		
	20. Jumlah PDS		5	25

	21. Rasio PDS terhadap Jumlah penduduk 22. Rasio PDS terhadap PDRB		5 5	25 25 75
5	Sosial Budaya	5		
	23. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk 24. Rasio Fasilitas Olah Raga per 10.000 penduduk 25. Jumlah Balai Pertemuan		2 2 1	10 10 5 25
6	Sosial Politik	5		
	26. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif, Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih 27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan		3 2	15 10 25
7	Luas Daerah	5		
	28. Luas Wilayah Keseluruhan 29. Luas Wilayah Efektif		1,8 2,4	9 12 21
8	Pertahanan	5		
	30. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah 31. Karakteristik Wilayah dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan		2,4 2	12 10 22
9	Keamanan	5		
	32. Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk		3	15 15
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat 33. Indeks Pembangunan Manusia	5		5 25
11	Rentang Kendali 34. Rata-rata Jarak Kabupaten/ Kota atau Kecamatan Kepusat Pemerintah (Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten) 35. Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten/ Kota (Ibukota Provinsi atau Kabupaten)	5	2 3	10 15 25
Total		100		471

Berdasar kajian analisis pembentukan daerah kabupaten berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 tersebut di atas, maka hasil perhitungan bobot nilai Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel.4.74
Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten Sambas Pesisir

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Nilai	Bobot Nilai
1	2	3	4	5
1	Kependudukan	20		
	1. Jumlah Penduduk		13	65

	2. Kepadatan Penduduk		5	25
2	Kemampuan Ekonomi	15		90
	3. PDRB Non Migas		5	25
	4. Pertumbuhan Ekonomi		5	25
	5. Kontribusi Non Migas		3	25
				75
3	Potensi Daerah	15		
	6. Rasio Bank dan Lembaga Non Bank per 10.000 penduduk		2,0	10
	7. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk		0,8	4
	8. Rasio Pasar per 10.000 penduduk		1,0	5
	9. Rasio Sekolah SD per penduduk usia SD		0,8	4
	10. Rasio Sekolah SLTP per penduduk usia SLTP		1,0	5
	11. Rasio Sekolah SLTA per penduduk Usia SLTA		0,8	4
	12. Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 penduduk		0,8	4
	13. Rasio Tenaga Medis per 10.000 penduduk		1,0	5
	14. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor dan Perahu motor atau Kapal		1,0	5
	15. Persentase Pelanggan Listrik Terhadap Jumlah Rumah Tangga		1,0	5
	16. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor		0,2	1
1	2	3	4	5
	17. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Penduduk usia 18 Tahun Keatas		1,0	5
	18. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 Terhadap Penduduk usia 25 Tahun Keatas		1,0	5
	19. Pasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk		1,0	5
				67
4	Kemampuan Keuangan	15		
	20. Jumlah PDS		2	10
	21. Rasio PDS terhadap Jumlah penduduk		5	25
	22. Rasio PDS terhadap PDRB		5	25
				60
5	Sosial Budaya	5		
	23. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 penduduk		2	10
	24. Rasio Fasilitas Olah Raga per 10.000 penduduk		2	10
	25. Jumlah Balai Pertemuan		0,6	3
				23
6	Sosial Politik	5		
	26. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif, Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih		3	15
	27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan		0,8	4
				19
7	Luas Daerah	5		

	28. Luas Wilayah Keseluruhan 29. Luas Wilayah Efektif		0,8 0,6	4 3 7
8	Pertahanan	5		
	30. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah 31. Karakteristik Wilayah dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan		3 1	15 5 20
9	Keamanan	5		
	32. Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan Terhadap Jumlah Penduduk		5	25 25
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5		
	33. Indeks Pembangunan Manusia		5	25 25
11	Rentang Kendali	5		
	34. Rata-rata Jarak Kabupaten/ Kota atau Kecamatan Kepusat Pemerintah (Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten) 35. Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten/ Kota (Ibukota Provinsi atau Kabupaten)		2 3	10 15 25
Total		100		426

Dalam rangka menetapkan kelulusan hasil analisis suatu indikator dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelulusan pembentukan daerah ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan katagori sesuai katagori dan total nilai indikator berdasarkan PP 78 Tahun 2007 yaitu :

Tabel 4.75
Kelulusan Ditentukan Oleh Total Nilai Seluruh Indikator dengan Katagori sesuai PP 78 Tahun 2007

No	Katagori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
1	2	3	4
1	Sangat Mampu	420 – 500	Rekomendasi
2	Mampu	340 – 419	Rekomendasi
3	Kurang Mampu	260 – 336	Ditolak
4	Tidak Mampu	180 – 259	Ditolak
5	Sangat Tidak Mampu	100 - 179	Ditolak

Suatu daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran)

mempunyai total nilai keseluruhan indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419)serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75), dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Apabila bobot nilai indikator Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Sambas Pesisir dibandingkan dengan kelulusan indikator sesuai dengan Ketentuan PP 78 tahun 2007 diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.76
Kategori Kelulusan Sebagai Kelayakan Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Sambas Pesisir Dan Kabupaten Sambas

No	Kategori Kelulusan	Total Nilai Seluruh indikator sesuai PP No. 78 tahun 2007	Total Nilai indikator Kabupaten Sambas	Total Nilai indikator Kabupaten Sambas Pesisir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sangat Mampu	420 – 500	471	426	Layak
2	Mampu	340 – 419	-	-	-
3	Kurang Mampu	260 – 336	-	-	-
4	Tidak Mampu	180 -259	-	-	-
5	Sangat Tidak Mampu	100 – 179	-	-	-

Berdasarkan hasil kajian analisis pembentukan daerah otonom sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 bahwa :

1. Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten induk mempunyai **kriteria sangat mampu** dengan **total nilai indikator 471**.
2. Kabupaten Sambas Pesisir sebaga kabupaten pemekaran mempunyai **kriteria sangat mampu** dengan **total nilai indikator 426** sehingga layak untuk diproses menjadi Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalimantan Barat.

C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mewujudkan Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Pengabungan Daerah.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh PPKSP dan Pemerintah kabupaten Sambas mewujudkan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah adalah

1. Menampung aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pemekaran Isu Publik.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Sambas Pesisir.
3. Meminta penjelasan Bupati tentang pembahasan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas.
4. Meminta nota jawaban Bupati atas pemandangan umum dan tanggapan DPRD Kabupaten Sambas termin I terhadap penyampaian rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
5. Mendegarkan Kata sambutan Bupati Sambas atas pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
6. Keluarnya keputusan Bupati Sambas tentang pembentukan panitia pendukung proses percepatan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
7. Menyurati Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat perihal mohon persetujuan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
8. Keluarnya keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang bantuan dana dalam APBD Propinsi Kalimantan Barat bagi calon Kabupaten Sambas Pesisir diwilayah Propinsi Kalimantan Barat.
9. Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan usul pemekaran Kabupaten Kabupaten Sambas Pesisir. kepada Menteri Dalam Negeri DPRD Kabupaten Sambas.
10. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas untuk mendengarkan penjelasan Bupati tentang pembahasan pemekaran Sambas.
11. Tanggapan anggota DPRD Kabupaten Sambas tentang penjelasan Bupati mengenai pemekaran Sambas Pesisir
12. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sambas membahas rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
13. Studi banding dilakukan Pansus ke Kabupaten-Kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran antara lain.

14. Pansus melakukan pembahasan tentang pemekaran Kabupaten Sambas dan mempunyai kesimpulan akhir menyetujui rencana pemekaran, menjadi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
15. Tanggapan akhir masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sambas. Semua fraksi mendukung terhadap rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
16. Keluarnya keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir.
17. Menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang persetujuan pemekaran kepada Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Isu pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir menjadi pembahasan di DPRD provinsi Kalimantan Barat. DPRD provinsi Kalimantan Barat membentuk Pansus pembahasan pemekaran Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD provinsi Kalimantan Barat.
18. Pendapat akhir fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan dalam rapat paripurna khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Keluarnya keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Sambas.
19. Usulan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir akan sampai pada Komisi II DPR-RI untuk dijadikan pembahasan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III yang berkenaan dengan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan persyaratan teknis yang diatur dalam PP. No. 78 Tahun 2007, maka calon Kabupaten Sambas Pesisir, dinyatakan layak menjadi daerah otonom baru. Selanjutnya dapat diusulkan sesuai dengan persyaratan pembentukan daerah otonom untuk mendapatkan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas dan selanjutnya diteruskan untuk mendapat persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta Gubernur

Provinsi Kalimantan Barat meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri agar mendapatkan persetujuannya.

2. Hambatan yang mempengaruhi pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir adalah di bagi dua : yang pertama Faktor pemekaran (faktor politis, faktor efektivitas dan efisiensi, faktor aspirasi rakyat), yang kedua Faktor dukungan proses pemekaran kabupaten Sambas pesisir (Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Polemik Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Potensi Elite Lokal).
3. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah adalah :
 - Menampung aspirasi dari masyarakat yang menginginkan pemekaran Isu Publik.
 - Melakukan penelitian dan pengkajian untuk memekarkan Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Sambas Pesisir.
 - Meminta penjelasan Bupati tentang pembahasan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas.
 - Meminta nota jawaban Bupati atas pandangan umum dan tanggapan DPRD Kabupaten Sambas termin I terhadap penyampaian rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
 - Mendengarkan Kata sambutan Bupati Sambas atas pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
 - Keluarnya keputusan Bupati Sambas tentang pembentukan panitia pendukung proses percepatan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
 - Menyurati Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat perihal mohon persetujuan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
 - Keluarnya keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang bantuan dana dalam APBD Propinsi Kalimantan Barat bagi calon Kabupaten Sambas Pesisir diwilayah Propinsi Kalimantan Barat.

- Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan usul pemekaran Kabupaten Kabupaten Sambas Pesisir. kepada Menteri Dalam Negeri DPRD Kabupaten Sambas.
- Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas untuk mendengarkan penjelasan Bupati tentang pembahasan pemekaran Sambas.
- Tanggapan anggota DPRD Kabupaten Sambas tentang penjelasan Bupati mengenai pemekaran Sambas Pesisir
- Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sambas membahas rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
- Studi banding dilakukan Pansus ke Kabupaten-Kabupaten yang telah melaksanakan pemekaran antara lain.
- Pansus melakukan pembahasan tentang pemekaran Kabupaten Sambas dan mempunyai kesimpulan akhir menyetujui rencana pemekaran, menjadi Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
- Tanggapan akhir masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sambas. Semua fraksi mendukung terhadap rencana pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
- Keluarnya keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir.
- Menyampaikan keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang persetujuan pemekaran kepada Gubernur Kalimantan Barat dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Isu pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir menjadi pembahasan di DPRD provinsi Kalimantan Barat. DPRD provinsi Kalimantan Barat membentuk Pansus pembahasan pemekaran Kabupaten Sambas yang dilaksanakan oleh Komisi A DPRD provinsi Kalimantan Barat
- Pendapat akhir fraksi fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan dalam rapat paripurna khusus DPRD Provinsi Kalimantan Barat Keluarnya keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Sambas.
- 19. Usulan pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir akan sampai pada Komisi II DPR-RI untuk dijadikan pembahasan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Upaya dan aktivitas pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas mensikapi kepentingan masyarakat dan semua pihak yang bersinergi serta senantiasa mengikuti mekanisme dan prosedur yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
2. Untuk memenuhi persyaratan administratif tentang pemekaran calon Kabupaten Sambas Pesisir dan Kabupaten Sambas yang dilengkapi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sambas dan calon Kabupaten Sambas Pesisir yang mendapat persetujuan dan DPRD dan Bupati Kabupaten Sambas.
3. Pemerintah Kabupaten Sambas selanjutnya mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Sambas Pesisir dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Benyamin Hoessein, 1996, *Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagaan*, LAN, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- , 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Eko Prasjojo et.al, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zein, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Pontianak.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Muslimin Nasution, 1999, *Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar, Tanggal 21 September 1999, Yogyakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Suprihady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.

- Sasruddin M. Sattim, 2001, *Kebijaksanaan Penyelenggaraan Kehutanan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Makalah Seminra dan Lokakarya, Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Untan, Tanggal 5 Mei 2000, Pontianak.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigrat Publishing, Yogyakarta.
- Suko Wiyono, 2008, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*, Faza Media, Jakarta.
- Syaukani, et.al., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cetkan I, Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Puskap, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1989, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan*, Makalah, Jakarta.
- Tri Ratnawati, 2006, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

B. Peraturan PerundangUndangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah*.

